

LAPORAN AKHIR



INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT 2019 KABUPATEN BANYUWANGI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Dan Sasaran	6
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	7
1.4 Dasar Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pembangunan	8
2.2 Definisi Masyarakat	11
2.3 Pembangunan Masyarakat	13
2.4 Partisipasi Masyarakat	16
2.5 Toleransi	18
2.6 Kebutuhan Rasa Aman	19
2.7 Penanggulangan Bencana	19
2.8 Kesadaran Hukum	20
BAB III METODELOGI SURVEY	21
3.1 Metode Pengukuran Survey	21
3.2 Definisi Operasional Variabel	21
3.3 Populasi Dan Sampel	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Pengolahan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM	26
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	26
4.2 Gambaran Umum Responden	32
A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	32
B. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	32
4.3 Pembahasan	34
A. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	34
B. Indeks Gotong Royong	36
C. Indeks Toleransi	38
D. Indeks Rasa Aman	39
E. Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Tipologi	40
F. Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Tipologi Kecamatan	48

DAFTAR PUSTAKA 50

Tabel 2 Kriteria Indeks Pembangunan Masyarakat..... 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan kebudayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan masyarakat mencoba untuk mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan pembangunan kapasitas masyarakat kedepan yang lebih mandiri. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Talizuduhun Ndraha,1990:34)

Selanjutnya Konkon Subrata (1990:6) memberikan batasan tentang pembangunan masyarakat, yaitu: “ Pembangunan masyarakat adalah proses evaluasi dimana sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebutuhan dan aspirasi bekerjasama untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, materil dan spiritual bagi perseorangan dan masyarakat”. Pengertian pembangunan masyarakat diatas, menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya terorganisir secara berkelompok yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik,khususnya bagi anggotanya.

Tujuan pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya dalam hal ini, adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralkan belenggu-belenggu social yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat (adapt, tradisi, kebiasaan, cara dan sikap hidup yang dapat menjadi hambatan pembangunan). Selanjutnya, Talizuduhu Nddrana (1982:107) menguraikan tentang sasaran pembangunan masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat. dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- c. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian biasa membangun dengan atau tanpa partisipasi vertikal dari pihak lain.
- d. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Guna peningkatan kapasitas manusia dan masyarakat secara menyeluruh, pemerintah pusat melalui Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 menjelaskan mengenai pembangunan manusia dan masyarakat yang meletakkan indeks pembangunan masyarakat dengan melihat komposit pada indeks gotong-royong (0,55 pada tahun 2012), indeks toleransi (0,49 pada tahun 2012) dan indeks rasa aman (0,61 pada tahun 2012). Dimana indeks pembangunan masyarakat ini lebih menitikberatkan pada kegiatan dimasyarakat yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat sendiri maupun yang diupayakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2016 – 2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi ke-1 dari Pembangunan Kabupaten Banyuwangi adalah Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Berkaitan dengan pencapaian misi ke-1 tersebut maka sumber daya manusia dengan kualitas yang mendukung juga diperlukan. Keberhasilan program ditentukan dari strategi dan sumber daya pembangunan masyarakat yang bertindak sebagai pelaksananya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan indeks yang mengukur perkembangan kapasitas masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kapasitas masyarakat berfungsi untuk melihat perkembangan kualitas masyarakat dalam kehidupan sosial.

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan wujud keberhasilan dari program pengembangan sumber daya manusia pada suatu daerah. Indeks Pembangunan

Masyarakat dapat dilihat dari gotong royong, toleransi dan rasa aman. Gotong royong menggambarkan hubungan sosial dan wujud partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial. Toleransi menggambarkan respon dan bentuk sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial kepada minoritas. Rasa aman menggambarkan mengenai kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab dalam kegiatan organisasi massa sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Dengan ditetapkan indikator sasaran Indeks gotong royong, toleransi dan rasa aman sebagaimana untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan misi-1. Maka wajib dilaksanakan pengukuran Indeks pembangunan Masyarakat dengan kegiatan survei untuk mendapatkan hasil dari pengukuran tersebut.

1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dilaksanakannya Survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi ini adalah untuk:

1. Mengukur dan mengetahui mengenai hasil hitung Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019
2. Mengetahui hasil hitung Indeks Pembangunan Masyarakat yang merupakan komposit atas indeks gotong royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman.
3. Mengetahui dan menganalisis hasil hitung Indeks Pembangunan Masyarakat sebagai data dan informasi untuk arah kebijakan pembangunan masyarakat kedepan.

Sedangkan sasaran yang ini dijabari dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kondisi eksisting sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi
2. Kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempunyai potensi resiko perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Strategi dan arah kebijakan pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi kedepan.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk memenuhi hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan diatas, maka rangkaian kegiatan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Variabel, indikator dan item dalam definisi operasional variabel pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
2. Pelaksanaan survey lapangan dengan pendekatan dan metode survey yang ditentukan.
3. Menyusun laporan mengenai hasil hitung Survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.
4. Menganalisis hasil hitung Survey Indeks Pembangunan Masyarakat sebagai data dan informasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi kedepan.

1.4 Dasar Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 ini didasarkan pada:

1. Sasaran Pembangunan didalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
2. Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dengan meletakkan Indeks Pembangunan Masyarakat yang diukur sebagai komposit dari Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternative untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara manusiawi. Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternative yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu proses pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) maupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (*society*).

Menelaah pembangunan dalam masyarakat sebagai proses pertumbuhan dan perubahan, yaitu suatu proses yang menggambarkan dinamika dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Menurut Katz (dalam Yuwono 2001:47) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, sebagai usaha yang telah dilakukan pemerintah.

Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini akan dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran (dalam Yuwono 2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat lah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan

proses-proses pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya dalam Negara yang sedang berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah, menuju taraf yang lebih atas yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya dibutuhkan inisiatif, aktif dan kritis bagi setiap warga negaranya, artinya masyarakat dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Selanjutnya menurut Bachtiar effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Menurut Soekanto (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat terus-menerus bertambah dalam jangka panjang. Analisis tersebut menunjukkan bahwa data pendapatan perkapita bias digunakan untuk tiga tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai seluruh Negara pada suatu tahun tertentu.
2. Menggambarkan tingkat kecepatan / kelajuan pembangunan ekonomi diberbagai Negara.
3. Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai Negara.

2.1.1 Tujuan pembangunan yang dilakukan mencakup sasaran seperti :

1. Dalam usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah sekaligus untuk menghindari jurang perbedaan tingkat pembangunan antara daerah yang semakin dalam.
2. Pengarah dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat didaerah. Baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah yang saling sendiri.

3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat didalam suatu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
4. Membina daerah-daerah yang minus, daerah perbatasan dan tanah-tanah rits, dan program-program khusus.

Menurut Purwoko (dalam Yuwono 2001:54) mengemukakan terdapat tiga pembangunan masyarakat yakni :

1. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat interpretasi pembangunan masyarakat yang demikian merupakan kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok. Pembangunan dalam hal ini identik dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial, seperti kesehatan gizi, sanitasi, dan sebagainya yang keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan.
2. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Di banyak Negara pembangunan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih sublime dan sukar diukur seperti, keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian pikiran, dan sebagainya.
3. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Anggapan dasar dari interpretasi pembangunan yang demikian adalah manusia dan bukan ekonomi dan teknologi yang menjadi fokus dan sumber pembangunan yang utama. Kehendak, komitmen dan kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat merupakan sumber-sumber pembangunan yang strategi.

Dari pengertian ini jelas bahwa pembangunan harus terus dikembangkan dengan dukungan sumber-sumber daya yang tersedia, dan dari pendapat-pendapat diatas jelas bahwa masyarakat bertindak sebagai subjek dari suatu pembangunan dan dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya sebuah pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat maupun lingkup daerah. Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.2 Definisi Masyarakat

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu "musyarak".

Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

2.2.1 Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli

1. Pengertian masyarakat menurut definisi Paul B. Harton, yang mengatakan pendapatnya bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.
2. Pengertian masyarakat menurut definisi Abdul Syani mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
3. Pengertian masyarakat menurut definisi Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm mengatakan pendapatnya bahwa pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.
4. Pengertian masyarakat menurut definisi Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu

interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi.

5. Pengertian masyarakat menurut definisi John J. Macionis adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.
6. Pengertian masyarakat menurut definisi Gillin & Gillin mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh bersamaan.
7. Pengertian masyarakat menurut definisi Harton haunt adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan.
8. Pengertian masyarakat menurut Selo Sumardjan yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
9. Pengertian masyarakat menurut Marx Weber yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian masyarakat adalah

Masyarakat memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membuat kita lebih mudah mengetahui arti masyarakat. Karakteristik Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Memiliki wilayah tertentu
2. Dengan secara yang kolektif menghadapi atau menghindari musuh
3. Mempunyai cara dalam berkomunikasi
4. Timbulnya diskriminasi warga masyarakat dan bukan warga masyarakat tersebut.
5. Setiap dari anggota masyarakat dapat bereproduksi dan beraktivitas.

2.2.2 Unsur-unsur suatu masyarakat

1. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
2. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
3. adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

2.2.3 Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat :

1. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: geromboklan (harde), suku (stam), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
2. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kapentingan kedunian atau kepercayaan.

3. Masyarakat dipandang dari sudut Antropologi terdapat dua type masyarakat:
4. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya sederhana.
5. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang barmasyarakat, kerena pengetahuan modern sudah maju,tehknologi pun sudah berkembang,dan sudah mengenaltulisan.

2.2.4 Ciri-ciri dari suatu Masyarakat, diantaranya ialah :

1. Merupakan pengelompokkan individu.
2. Adanya interaksi antara individu-individu anggota masyarakat.
3. Adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
4. Individu-individu sebagai satu kesatuan mendukung, mengembangkan, dan meneruskan kebudayaan.

Masyarakat sebenarnya menganut sistem adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan keadaan), oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Selain itu masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup secara terus-menerus. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagai berikut :

1. Masyarakat membutuhkan adanya populasi (population replacement)
2. Masyarakat membutuhkan informasi
3. Masyarakat membutuhkan energi
4. Masyarakat membutuhkan materi
5. Masyarakat membutuhkan sistem komunikasi
6. Masyarakat membutuhkan sistem produksi
7. Masyarakat membutuhkan sistem distribusi
8. Masyarakat membutuhkan sistem organisasi sosial
9. Masyarakat membutuhkan sistem pengendalian sosial
10. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

2.3 Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan

mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pengertian Baku mengenai pembangunan masyarakat telah ditetapkan PBB, dalam Konkon Subrata (1991:4) bahwa: "Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang ditumbuhkan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi social masyarakat seluruhnya kepada inisiatif masyarakat".

Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi social dan kebudayaan masyarakat (komunitas). Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki tarap hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah.

Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Talizuduhun Ndraha,1990:34) Selanjutnya Konkon Subrata (1990:6) memberikan batasan tentang pembangunan masyarakat, yaitu: " Pembangunan masyarakat adalah proses evaluasi dimana sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebutuhan dan aspirasi bekerjasama untuk memperbaiki keadan social ekonomi yang lebih baik, materil dan spiritual bagi perseorangan dan masyarakat". Pengertian pembangunan masyarakat diatas, menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya terorganisir secara berkelompok yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik,khususnya bagi anggotanya.

Tujuan pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya dalam hal ini, adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralsisir belenggu-belenggu social yang dapat menahan laju perkenbangan masyarakat (adapt, tradisi, kebiasaan, cara dan sikap hidup yang dapat menjadi hambatan pembangunan). Selanjutnya, Talizuduhu Nddrana (1982:107) menguraikan tentang sasaran pembangunan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat. dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
3. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian biasa membangun dengan atau tanpa partisipasi vertikal dari pihak lain.
4. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lebih lanjut Talizuduhu Ndrana (1989: 170) berpendapat bahwa keempat sasaran pembangunan masyarakat diatas yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, pembangkitan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri tidak berdiri sendiri melainkan diusahakan agar satu berkaitan dengan yang lainnya sehingga ketiganya sebuah paket usaha.

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan sendiri kaderisasi. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan. Prinsip keberlanjutan, memberi arah bahwa pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan bertahap dan terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menurut adanya kegiatan lanjutan. Prinsip keserasian, mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan teras yang dinyatakan oleh perorangan, lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian ini pun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan

rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin antara kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya sebuah pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat maupun lingkup daerah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan subjek dari suatu pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu berdasarkan pemaparan dari Talizuduhu Ndrana (1989: 170) salah satu sasaran dalam pembangunan masyarakat adalah pembangkitan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2003:17). Huraerah (2008: 103) menyatakan bahwa partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Menurut Muller (2006: 256), definisi partisipatif baik secara deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Tjokroamidjojo (1977) dalam Wahyuni (2014: 11) yang menegaskan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara.

2.4.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Huraerah (2008: 103) memaparkan bahwa bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat. Berikut merupakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya.
6. Partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat dengan syarat. Meskipun hanya dengan bentuk mengiyakan itu merupakan partisipasi yang harus dihargai.

2.4.2 Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Huraerah (2008: 100) memaparkan bahwa terdapat tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktek pembangunan masyarakat yang demokratis antara lain:

1. Partisipasi politik merupakan representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses-pemerintahan.
2. Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai beneficiary pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus

proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program.

3. Partisipasi warga ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek) tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2.5 Toleransi

Pada dasarnya konsep toleransi erat hubungannya dengan sikap terhadap segala sesuatu yang berbeda. Sikap yang dimaksudkan adalah sikap untuk menghormati, menghargai, bertenggang rasa, dan memberi kesempatan terhadap keberadaan segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam diri kita. Toleransi berasal dari bahasa latin "*tolerantia*", yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia (Walzer, 1997 dalam Casram, 2016: 188). Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dapat hidup sendiri. Toleransi dalam konteks sosial, budaya, politik dan agama dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau yang tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Casram (2016: 189) memaparkan bahwa konsep toleransi berkaitan dengan konsep multikulturalisme. Masyarakat multikultural dapat dimaknai sebagai suatu tatanan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen, dimana pola hubungan antarindividu dalam masyarakat bersifat toleran dan bersedia menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan segala perbedaan yang ada. Terdapat tiga unsur dalam multikulturalisme yakni, (1) terkait dengan kebudayaan, (2) merujuk kepada pluralitas (keragaman) kebudayaan, dan (3) cara tertentu untuk menanggapi pluralitas tersebut. Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya asimilasi kebudayaan. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat multikultural berasimilasi mengenai bagaimana keberagaman yang baik

dalam masyarakat yang heterogen. Hal tersebut kemudian menciptakan rasa toleransi dan kerjasama antar sesama.

2.6 Kebutuhan Rasa Aman

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan tingkat kedua. Seseorang mempunyai harapan untuk dapat memenuhi standar hidup yang dianggapnya wajar. Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatannya, wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dia dapat bekerja dengan antusias dan penuh produktivitas bila dirasakan adanya jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, munculah apa yang digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat kita amati pada seorang anak. Biasanya seorang anak membutuhkan suatu dunia atau lingkungan yang dapat diramalkan. Seorang anak menyukai konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Jika hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan (Frank, 1987: 73). Kebutuhan akan keselamatan atau keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik.

2.7 Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana menurut Rahmat merupakan seluruh aspek kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Tujuan dari manajemen bencana adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Carter mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi

(pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2.8 Kesadaran Hukum

Soeharso (2005) dalam Hasibuan (2013: 79) memaparkan bahwa kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Ewick dan Silbey dalam Achmad (2009:80), kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Adanya kesadaran masyarakat akan hukum diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk ketaatan serta ketertiban hukum. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan dari Hasibuan (2013: 81) bahwa peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Hal yang ditekankan sebenarnya adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1982: 152). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Kutschincky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159): a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

BAB III METODELOGI SURVEY

3.1 Metode Pengukuran Survey

Pengukuran survey indeks pembangunan masyarakat didasarkan pada metode survey yang mengacu kepada perhitungan rata-rata ukur (geometrik). Rata-rata ukur (geometrik) adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakarpangkatkan dengan jumlah data sampel tersebut. Secara matematis rata-rata ukur (geometrik) dirumuskan seperti berikut ini

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

Survei indeks pembangunan masyarakat ini dilakukan dengan teknik pemberian kuisisioner, baik dengan pengisian sendiri maupun kuisisioner dengan wawancara tatap muka. Dalam pengukuran hasil survey indeks pembangunan masyarakat ini didalamnya meliputi komposit indeks gotong royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel untuk pengukuran survey indeks pembangunan masyarakat kabupaten Banyuwangi tahun 2019 ini melihat pada transisi perubahan Dimensi dan Variabel yang diletakkan pada IPEMas Nasional Tahun 2015 kepada perubahan Dimensi dan Variabel perubahan pada tahun 2019 yang masih dalam proses penyesuaian dan sinkronisasi terhadap indikator dan item serta cara perhitungan yang terbaru. Oleh karena untuk IPEMas Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 ini menggunakan variabel, indikator dan item perubahan yang ada, tetapi menggunakan dimensi ukur yang sama dengan IPEMas Nasional tahun 2015 (dimensi gotong royong, dimensi toleransi dan dimensi rasa aman)

Adapun konversi variabel dan indikator yang ada guna menindaklanjuti rencana perubahan pada IPEMas Nasional itu, dibuat DOV sebagai berikut :

IPMas KONSEP AWAL (RPJMN 2015-2019)		
Dimensi	Komponen	Variabel
Gotong royong	Tingkat kepercayaan	Percaya untuk menitipkan rumah kepada tetangga ketika semua ART bepergian/menginap di tempat lain percaya menitipkan anak (usia 0-12 tahun) pada tetangga jika tidak ada satupun ART dewasa ada di rumah
	Tolong menolong	Kemudahan mendapatkan pertolongan dari tetangga (selain kerabat) di lingkungan tempat tinggal ketika sedang mengalami masalah keuangan
	Aksi kolektif	Kebiasaan mengikuti kegiatan bersama untuk membantu warga yang mengalami musibah (keamatan, sakit, dll) di lingkungan tempat tinggal

Hasil Pengembangan IPMas		
Dimensi	Isu/Konteks/Komponen	Variabel
Koheesi Sosial	Kerjasama sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial
	Jejaring sosial	Partisipasi dalam kegiatan kelompok
	Aksi kolektif	Partisipasi dalam kegiatan umum
	Kepercayaan sosial	Sikap percaya terhadap lingkungan

IPMas KONSEP AWAL (RPJMN 2015-2019)		
Dimensi	Komponen	Variabel
Toleransi	Toleransi antar umat beragama	Tanggapan terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal oleh sekelompok orang dari agama lain
	Toleransi antar suku	Tanggapan terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal oleh sekelompok orang dari suku lain

Hasil Pengembangan IPMas		
Dimensi	Isu/Konteks/Komponen	Variabel
Inklusi Sosial	Penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya	Tanggapan terhadap kegiatan keagamaan / etnis lain
	Inklusi terhadap minoritas	Tanggapan terhadap pimpinan daerah dari suku/etnis lain
	Kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan Kesehatan ibu Peran wanita dalam jabatan publik
	Dukungan sosial kepada minoritas	Hambatan dalam mengakses Fasum

IPMas Konsep AWAL (RPJMN 2015-2019)		
Dimensi	Komponen	Variabel
Kesadaran Hukum	Rasa Aman	Perasaan aman di lingkungan tempat tinggal

Hasil Pengembangan IPMas		
Dimensi	Isu/Konteks /Komponen	Variabel
Pengembangan kapasitas Masyarakat Sipil	Kesadaran hukum	<ul style="list-style-type: none"> Sikap percaya terhadap penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan Partisipasi dalam Pemilu yang terakhir (2014)
	Organisasi sipil	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan LSM yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat Keanggotaan dalam organisasi massa (ormas) dan partai politik (partai)
	Mitigasi risiko sosial	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas / upaya antisipasi/mitigasi bencana alam Partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam
	Penyelesaian sengketa secara beradab	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan aparat keamanan/pemerintah sebagai penengah dalam kekerasan massa Keterlibatan tokoh agama/masyarakat sebagai penengah dalam kekerasan massa

3.3 Populasi Dan Sampel

Teknik sampling dengan menggunakan *Cluster Propotionate Random Sampling*, yang artinya membagi secara proporsional Kecamatan dan Desa yang menjadi sampel

Jumlah Sampel = $\frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$ n penelitian ini ditentukan dengan melihat pada tabel di, 1981 berikut:

Keterangan :

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10 %

N = Jumlah Populasi

P = Q = 0,1

d = 0,01

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten Banyuwangi yakni sebesar 1.735.845 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1.085 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dari Steward Isaac. Berikut merupakan pemetaan sampel:

Total = 60 enumerator untuk 25 Desa dan 28 Kelurahan, 25 Kecamatan
@ Enumerator = 1085 Kuesioner (dalam 25 Desa dan 28 Kelurahan)

Untuk menghindari bias maka pemilihan responden adalah responden yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey menggunakan alat bantu kuesioner yang mencakup 3 Dimensi indeks pengukuran survei indeks pembangunan masyarakat yang sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Dari 3 dimensi indeks tersebut di turunkan menjadi 33 item atau pertanyaan kuesioner.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Nilal IPEMas dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing dimensi indeks. Dalam penghitungan survei indeks pembangunan masyarakat terhadap 3 dimensi indeks yang dikaji, setiap dimensi indeks memiliki penimbang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Gotong Royong

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}} = \frac{1}{12} = 0,084$$

Indeks Toleransi

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}} = \frac{1}{9} = 0,112$$

Indeks Rasa Aman

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}} = \frac{1}{12} = 0,084$$

Untuk memperoleh nilai masing-masing dimensi indeks tersebut digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dimensi Indeks} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per item} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total item yang terisi}}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Nilai Indeks Variabel dihitung dari nilai rata rata tertimbang pada masing-masing item pertanyaan dengan jenis data berupa data ordinal. Metode penghitungan angka indeks digunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pertanyaan dengan penghitungan rata rata tertimbang. Guna memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks variabel antara 0,25 - 1 maka dilakukan konversi dengan nilai dasar 0,25 yaitu dengan cara Jumlah Nilai Rata-rata Item X 0,25.

$$\text{Dimensi Indeks} = \text{Total Nilai Rata-Rata Terbagi Unsur Item} \times 0,25$$

Tabel 1 Kriteria Indeks Pembangunan Masyarakat

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kualitas Masyarakat	Kategori Pembangunan Masyarakat
1	1,00 - 1,75	0,25 - 0,43	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	0,44 - 0,62	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	0,63 - 0,81	B	Baik
4	3,26 - 4,00	0,82 - 1	A	Sangat Baik

Sedangkan yang menjadi rumus komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPEMas) Kabupaten Banyuwangi, digunakan rumus sebagai berikut :

$$IPEMas = \sqrt[3]{(\text{Indeks Toleransi} \times \text{Indeks Gotong royong} \times \text{Indeks Rasa Aman}) \times 100}$$

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

A. Aspek Geografi

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Bondowoso disebelah Barat, dan Selat Bali disebelah Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Banyuwangi

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi

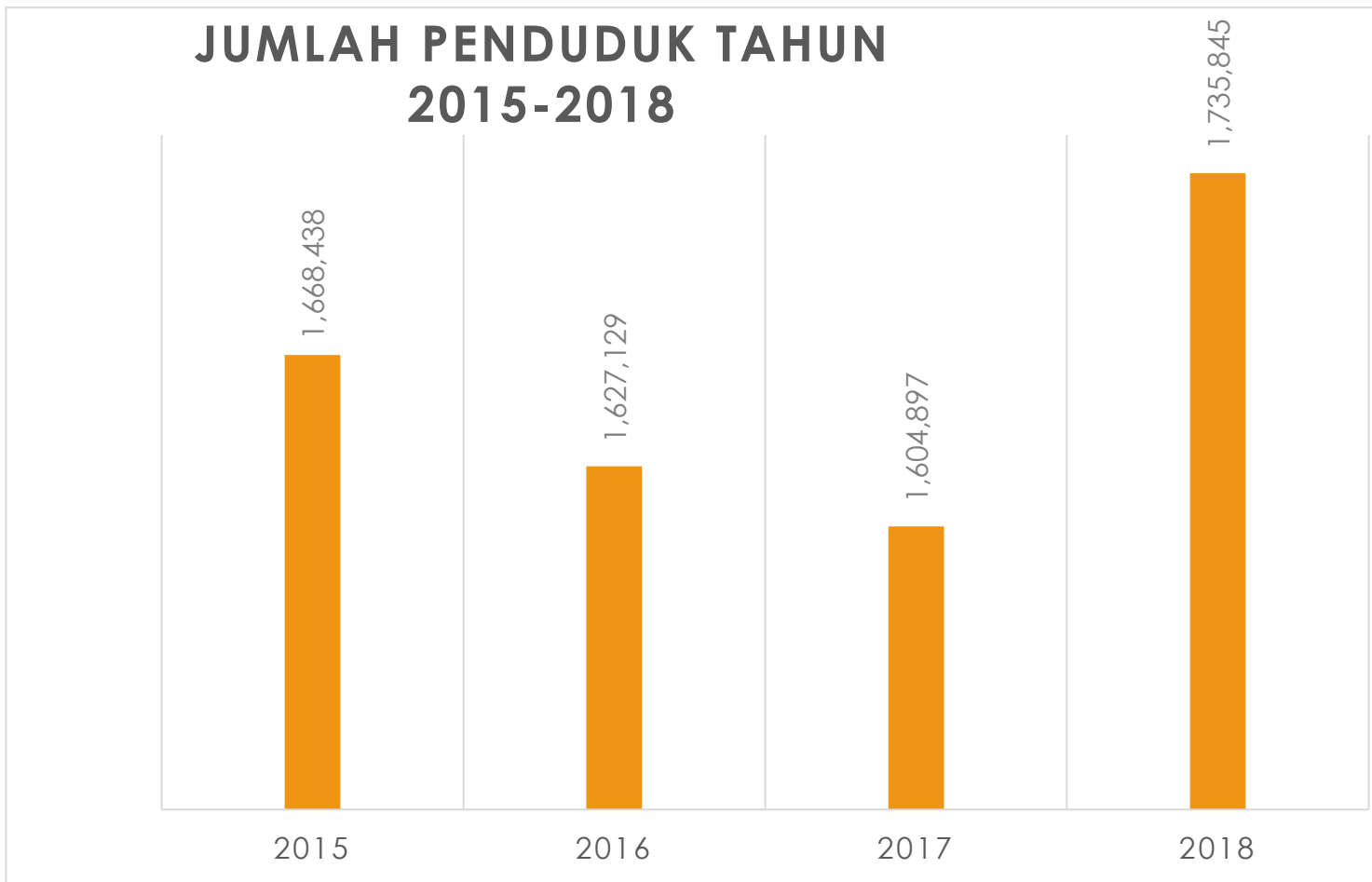
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Pesanggaran	5	-	14	Rogojampi	10	-
2	Siliragung	5	-	15	Kabat	14	-
3	Bangorejo	7	-	16	Singojuruh	11	-
4	Purwoharjo	8	-	17	Sempu	7	-
5	Tegaldlimo	9	-	18	Songgon	9	-
6	Muncar	10	-	19	Glagah	8	2
7	Cluring	9	-	20	Licin	8	-
8	Gambiran	6	-	21	Banyuwangi	-	18
9	Tegalsari	6	-	22	Giri	2	4
10	Glenmore	7	-	23	Kalipuro	5	4
11	Kalibaru	6	-	24	Wongsorejo	12	-
12	Genteng	5	-	25	Blimbingsari	10	-
13	Srono	10	-	Jumlah		189	28

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 189 desa/ kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa.

B. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebanyak 1,693,630 jiwa. Jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2017 meningkat sebanyak 8,645 jiwa atau 0,5 persen dari tahun 2016. Angka pertumbuhan ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015 ke 2016 yang sebanyak 16.547 jiwa dalam setahun. Pertumbuhan penduduk yang menurun ini merupakan keberhasilan untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk sebab jika laju pertumbuhan penduduk terlalu tinggi juga akan menjadi permasalahan bagi daerah di masa mendatang.



Gambar 4. 2 Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 - 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

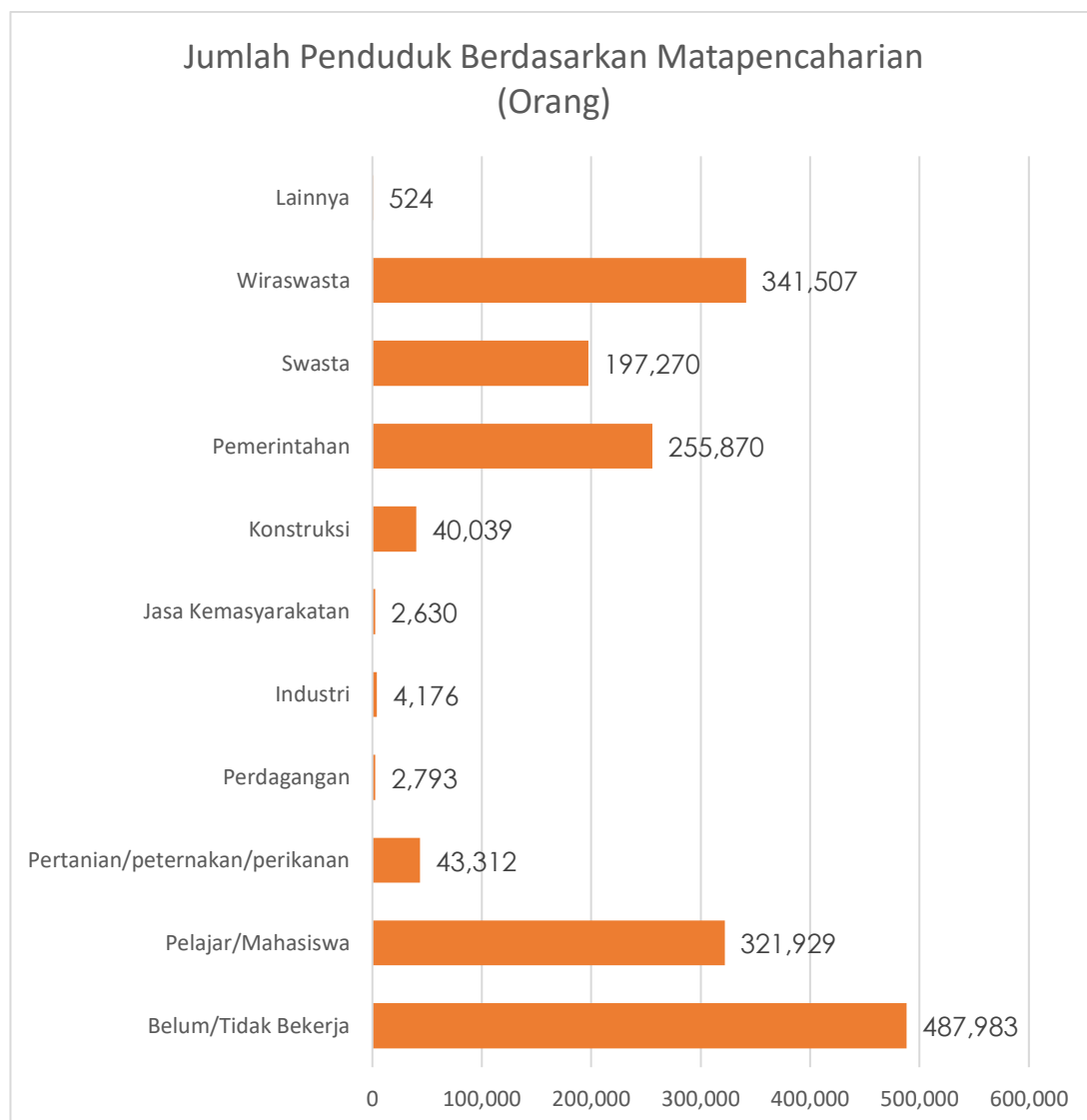
Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan usia masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 - 59 tahun dengan jumlah 1,132,950 jiwa atau sebesar 65.27%. Sisanya sebanyak 602,895 jiwa atau sebesar 34.73% merupakan penduduk tidak produktif yaitu penduduk dengan usia 0-14 tahun dan penduduk usia lanjut 60-75 tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.



Gambar 4. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Usia Tahun 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Sedangkan jika dilihat dari sumber mata pencariannya, maka dapat dilihat bahwasannya proporsi terbesar adalah penduduk yang masih atau belum bekerja dengan proporsi sebesar 28.74%. sedangkan proporsi terbesar selanjutnya secara berurutan adalah, Wiraswasta dengan proporsi sebesar 20.11%, Pelajar/Mahasiswa 18.96%, Pemerintahan 15.07%, Swasta 11.62%, Pertanian 2.55%. Sedangkan untuk proporsi sisanya, masing-masing berada dibawah 1%.



Gambar 4. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2017

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

C. Sarana dan Prasarana Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah guna mendukung kegiatan masyarakatnya. Beberapa sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan tempat peribadatan yang secara rinci datanya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 - 2017

No.	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017
-----	---------------------	------	------	------

1.	Rumah Sakit	12	14	14
2.	Rumah Bersalin Maternal	1	1	1
3.	Puskesmas	45	45	45
4.	Posyandu	2.265	2.265	2.265
5.	Klinik	35	35	35
6.	Polindes	98	98	98
Total		2.456	2.458	2.458

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 - 2017 mengalami peningkatan pada jumlah rumah sakit dari 12 unit di tahun 2015 menjadi 14 unit di tahun 2017. Sementara untuk jumlah fasilitas kesehatan lainnya masih stagnan dari tahun 2015 - 2017 jumlahnya tetap sama. Secara keseluruhan jumlah total fasilitas kesehatan Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari 2.456 unit di tahun 2015 menjadi 2.458 unit di tahun 2017. Sementara dibidang pendidikan, jumlah fasilitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2018

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK	759
2.	RA/BA	109
3.	SD	820
4.	MI	239
5.	SMP	185
6.	MTs	104
7.	SMA	51
8.	SMK	75
9.	MA	49
Total		2.391

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2018 yang paling banyak yaitu Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah unit sebanyak 820 dan kemudian disusul oleh Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 759 unit. Untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2018 yang paling sedikit yaitu MA dengan jumlah unit sebanyak 49. Sementara itu, jumlah tempat peribadatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	1.607
2.	Musholla	4.727
3.	Gereja Protestan	201
4.	Gereja Katholik	15
5.	Vihara	138
7.	Pura	24

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah tempat peribadatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 yang paling banyak yaitu musholla dengan jumlah sebanyak 4.727 unit. Sedangkan jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 yang paling sedikit yaitu Gereja Katolik sebanyak 15 unit.

4.2 Gambaran Umum Responden

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang menjadi responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2019 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data jumlah responden survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
		Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	639	59%
2.	Perempuan	447	41%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah total keseluruhan responden adalah sebanyak 1086 orang dengan responden laki-laki berjumlah 639 orang dan responden perempuan berjumlah 447 orang. Secara persentase, jumlah responden laki-laki dalam survey ini adalah sebesar 59% sedangkan responden perempuan sebesar 41%.

B. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang dijadikan sebagai responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2019 ini memiliki background pendidikan yang beragam. Beragam background pendidikan masyarakat Kabupaten

Banyuwangi tersebut kemudian digolongkan menjadi 4 tingkatan yaitu SLTA kebawah, D1/D2/D3, D4/S1, dan Pascasarjana (S2/S3). Berikut adalah data jumlah responden survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 dari masing-masing tingkatan pendidikan:

Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tipologi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	
		Jumlah	Presentasi (%)
1.	SLTA kebawah	751	69%
2.	D1/D2/D3	91	8%
3.	D4/S1	238	22%
4.	Pascasarjana	6	1%
TOTAL		1086	100%

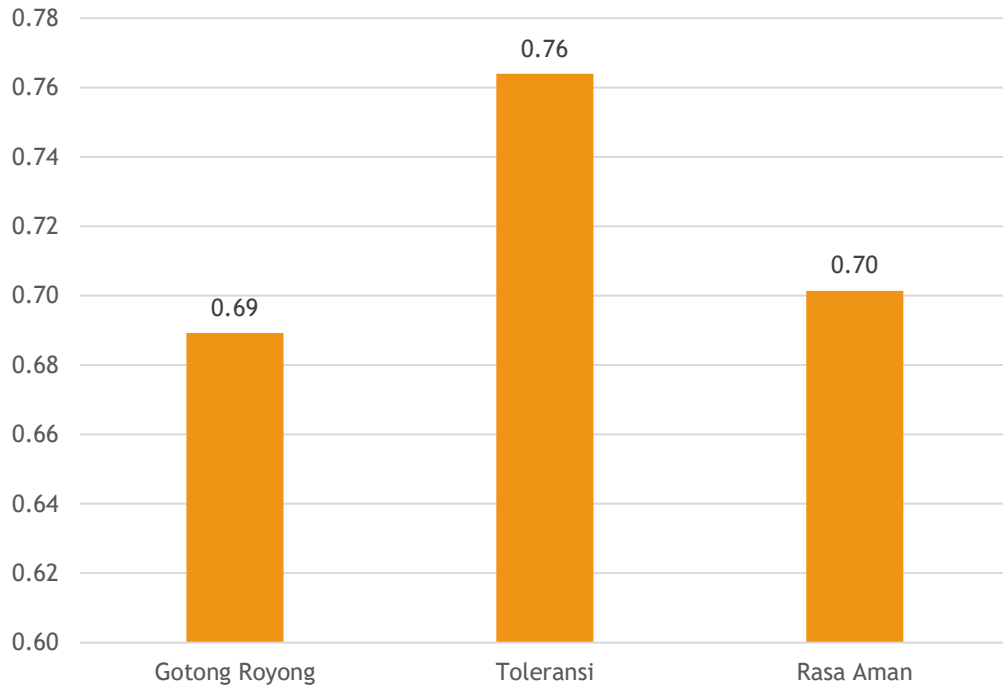
Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan responden dalam survey indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 adalah sebesar 1086 responden. Jumlah responden terbanyak yaitu dari jenjang pendidikan SLTA kebawah dengan jumlah responden sebesar 751 sedangkan jumlah responden tersedikit yaitu dari jenjang pendidikan pascasarjana (S2/S3) dengan jumlah responden sebanyak 6 orang. Secara persentase, jumlah responden dengan tingkat pendidikan SLTA kebawah adalah sebesar 69%, tingkat D1/D2/D3 sebesar 8%, tingkat D4/S1 sebesar 22%, dan tingkat pascasarjana sebesar 1%.

4.3 Pembahasan

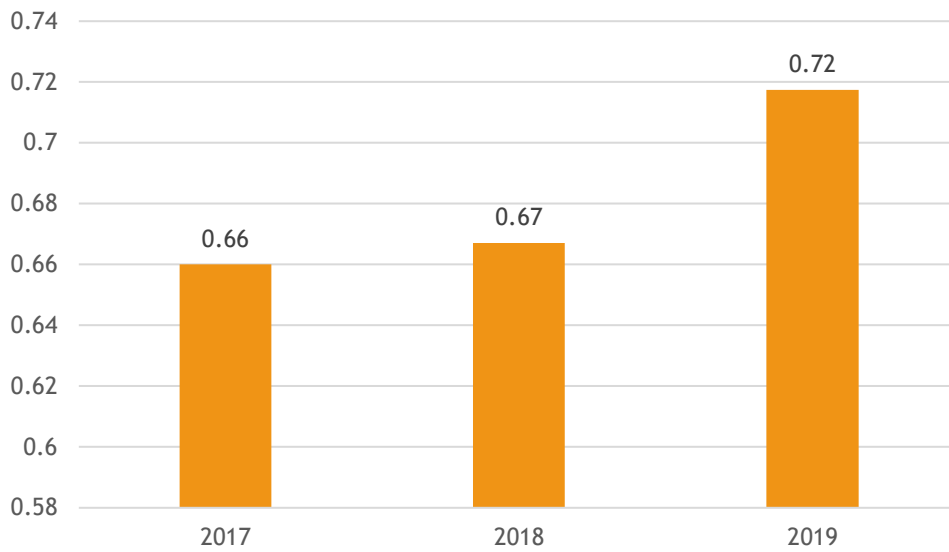
A. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)

Gambar 4. 5 Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi 2019

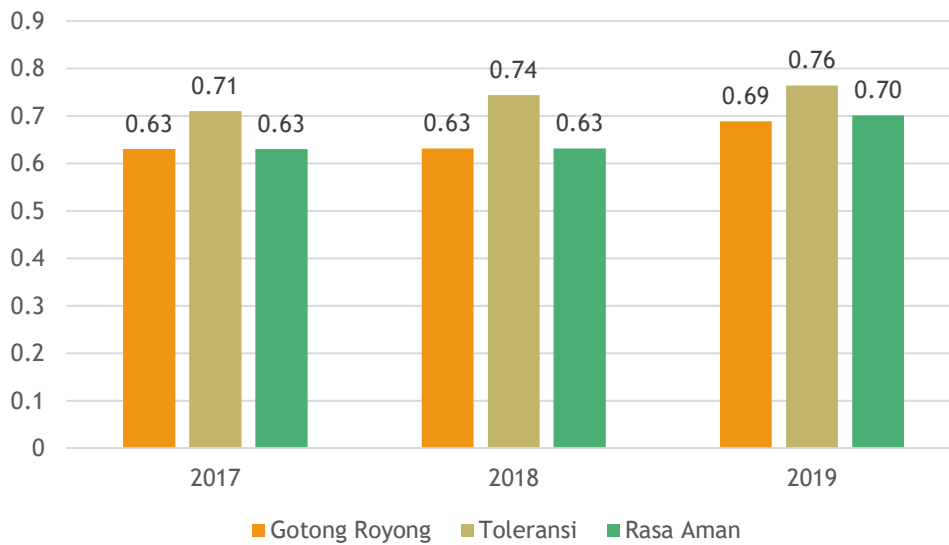


Berdasarkan dari ketiga indeks seperti gambar 4.5 bahwa indeks toleransi paling tinggi nilai nya dengan nilai indeks toleransi 0.76 artinya kategori pembangunan masyarakat di dimensi toleransi baik (B). Indeks gotong royong bernilai 0.69 dan rasa aman 0.70, artinya bahwa berkategori pembangunan masyarakat baik (B), namun dengan nilai tersebut masih memungkinkan jatuh menjadi nilai (C). Kumulatif Indeks toleransi, gotong royong, dan rasa aman membentuk indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan nilai **0.72**.

Gambar 4. 6 Perbandingan IPMas Banyuwangi 2017-2019



Gambar 4. 7 Perbandingan IPMas Banyuwangi 2017-2019 berdasarkan dimensi



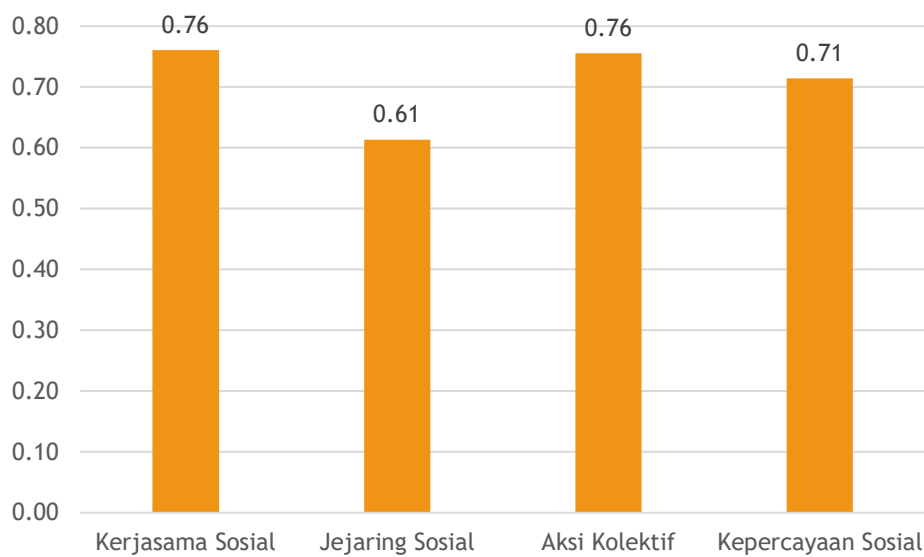
Indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 ini mendapatkan nilai **0.72** dimana interpretasinya kategori pembangunan masyarakatnya baik, jika dibandingkan dengan nasional maupun IPMas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 masih lebih tinggi. Indeks toleransi merupakan nilai tertinggi dari tiga komponen indeks pembentuk IPMas Kabupaten Banyuwangi dan mengalami kenaikan jika pada tahun 2018

memiliki nilai 0,74 pada tahun ini nilainya menjadi lebih besar yakni 0,76. Artinya bahwa toleransi di Banyuwangi sudah baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Indeks Gotong royong Banyuwangi pada tahun ini yakni pada nilai 0.63 hal ini meningkat dengan tahun sebelumnya namun jika dibandingkan dengan posisi indeks gotong royong nasional. Kondisi Gotong royong Banyuwangi tergolong masih paguyuban, kepercayaan masyarakat terhadap tetangga relative baik, namun partisipasi ketika kegiatan pertemuan sedikit menurun. Ini perlu didukung untuk mendukung pembangunan masyarakat, sesuai pandangan Menurut Talizuduhu Nddrana (1982:107) Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan tarap hidup masyarakat.

Indeks Rasa aman Banyuwangi pada tahun 2019 ini juga pada angka lebih meningkat dari tahun 2017 dan 2018, yakni di nilai 0,69 . sebagian berpendapat indeks rasa aman ini terjadi karena perasaan aman yang diciptakan bukan karena di daerahnya namun, kecenderungan lemah terhadap rasa aman karena cara pandangya terhadap keadaan berdasarkan penglihatan pada media elektoronik.

B. Indeks Gotong Royong

Indeks gotong royong pada dasarnya menyajikan gambaran tentang perilaku individu yang berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya. Indeks Gotong Royong merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Gotong Royong terdiri dari 4 indikator yakni kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif serta kepercayaan sosial.



Gambar 4. 8 Indikator Indeks Gotong Gotong

Tabel 4. 7 Klasifikasi Rentang Nilai

1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

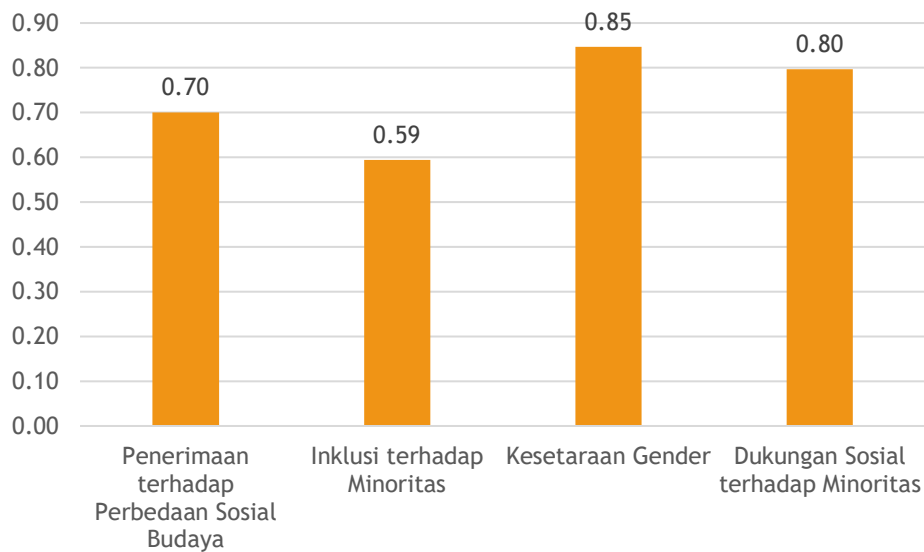
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai indikator kerjasama sosial sebesar 0,76; jejaring sosial sebesar 0,61; aksi kolektif sebesar 0,76 dan kepercayaan sosial sebesar 0,71. Indikator yang memiliki nilai tertinggi diantara keempat indikator adalah aksi kolektif dan kerjasama sosial, sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah jejaring sosial. Sejalan dengan nilai indikator tersebut, ketiga indikator yang memiliki nilai diatas 0,63 menunjukkan kriteria Baik (B) yakni indikator kerjasama sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial. Indikator jejaring sosial yang memiliki nilai terendah

diantara empat indikator dalam Indeks Gotong Royong menunjukkan kriteria Kurang Baik (C). Berikut merupakan Grafik Indikator Indeks Gotong Royong:

C. Indeks Toleransi

Indeks toleransi pada dasarnya menyajikan gambaran tentang perilaku individu dalam penerimaan terhadap perbedaan di lingkungan. Indeks Toleransi merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Toleransi terdiri dari 4 indikator yakni penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender dan dukungan sosial kepada minoritas.



Gambar 4. 9 Indikator Indeks Toleransi

Tabel 4. 8 Klasifikasi Rentang Nilai

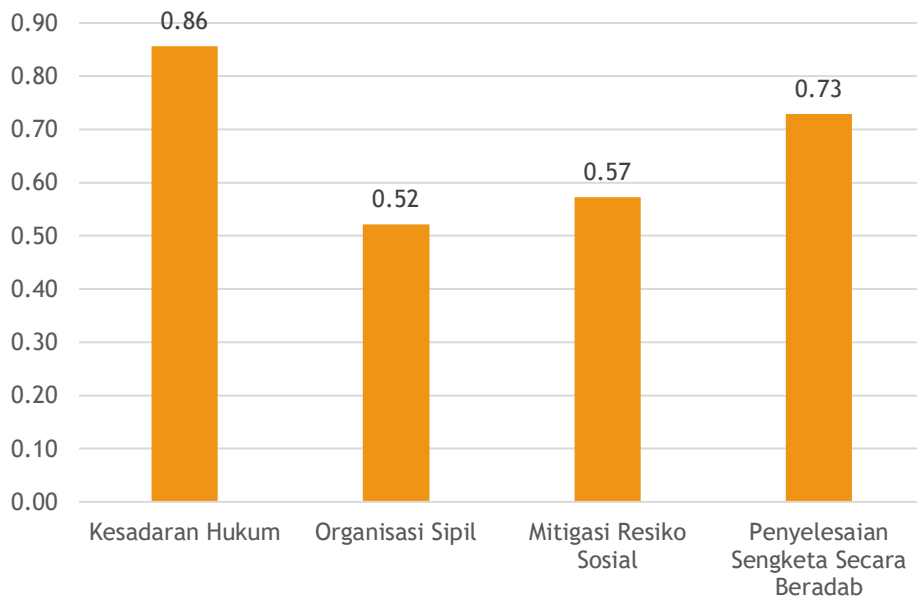
1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Toleransi tersebut terdiri dari nilai indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya sebesar 0,70; inklusi terhadap minoritas sebesar 0,59; kesetaraan gender sebesar 0,85 dan dukungan sosial kepada minoritas sebesar 0,80. Indikator yang memiliki nilai tertinggi diantara keempat indikator adalah kesetaraan gender yakni dalam kriteria sangat baik (A), sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah inklusi terhadap minoritas dengan kriteria kurang baik (C)

D. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.



Gambar 4. 10 Indikator Indeks Rasa Aman

Tabel 4. 9 Klasifikasi Rentang Nilai

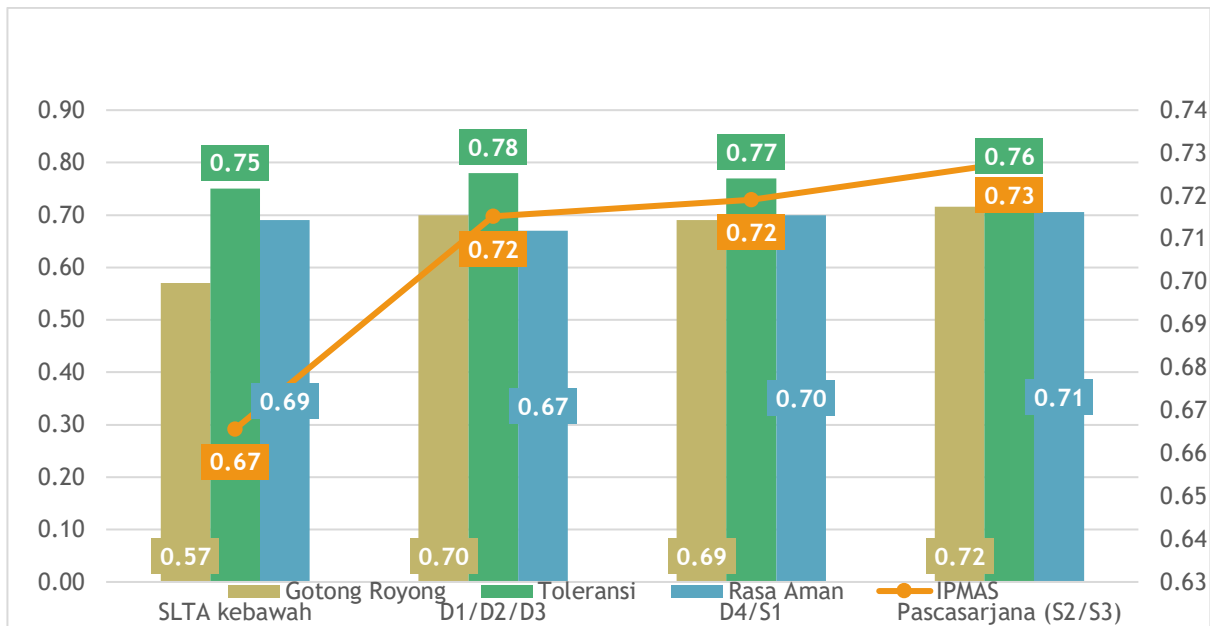
1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,7 terdiri dari nilai indikator Kesadaran Hukum sebesar 0,86; Organisasi Sipil sebesar 0,52; Mitigasi Risiko Sosial sebesar 0,57 dan Penyelesaian Sengketa Secara Beradab sebesar 0,73. Indikator yang memiliki nilai tertinggi diantara keempat indikator adalah Kesadaran Hukum dengan kriteria Baik (B). Indikator yang memiliki nilai terendah adalah Organisasi Sipil dengan kriteria Tidak Baik (D).

E. Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Tipologi

Dalam survey indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 ini terdapat Keempat variabel tersebut adalah gotong royong, toleransi, rasa aman, dan IPMas. Berikut adalah grafik IPMas berdasarkan tipologi pendidikan:



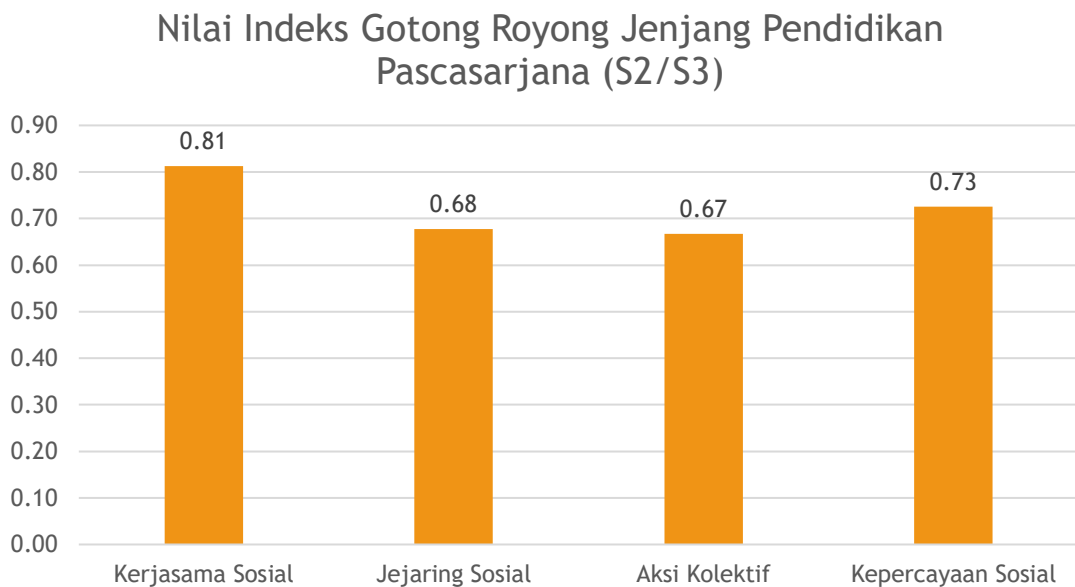
Gambar 4. 11 Grafik IPMas Berdasarkan Tipologi Pendidikan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai IPMas tertinggi berdasarkan tipologi pendidikan diraih oleh responden pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2/S3) dengan nilai IPMas 0,73. Sementara nilai IPMas terendah berdasarkan tipologi pendidikan diraih oleh responden pada jenjang pendidikan SLTA kebawah dengan nilai IPMas 0,67. Nilai IPMas pada dua jenjang pendidikan tersebut masuk pada kategori Baik yaitu pada rentang nilai 0,63 – 0,81. Selain IPMas, terdapat 3 variabel pembentuk IPMas yaitu gotong royong, toleransi, dan rasa aman yang disajikan dalam grafik diatas. Untuk variabel gotong royong nilai tertinggi diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2/S3) dengan nilai gotong royong 0,72 termasuk pada kategori Baik sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan SLTA kebawah dengan nilai gotong royong 0,57 termasuk pada kategori Kurang Baik. Untuk variabel toleransi nilai tertinggi diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan D1/D2/D3 dengan nilai toleransi 0,78 termasuk pada kategori Baik sedangkan nilai terendah diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan SLTA kebawah dengan nilai toleransi 0,75 termasuk pada kategori Baik. Untuk variabel rasa aman nilai tertinggi diraih oleh responden dengan tingkat

pendidikan pascasarjana (S2/S3) dengan nilai rasa aman 0,71 termasuk pada kategori Baik sedangkan nilai terendah diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan D1/D2/D3 dengan nilai rasa aman 0,67 termasuk pada kategori Baik.

Jika dilihat berdasarkan nilai indikator pada tiap-tiap variabelnya menurut jenjang pendidikan, secara rinci datanya terlihat seperti grafik-grafik dibawah ini:

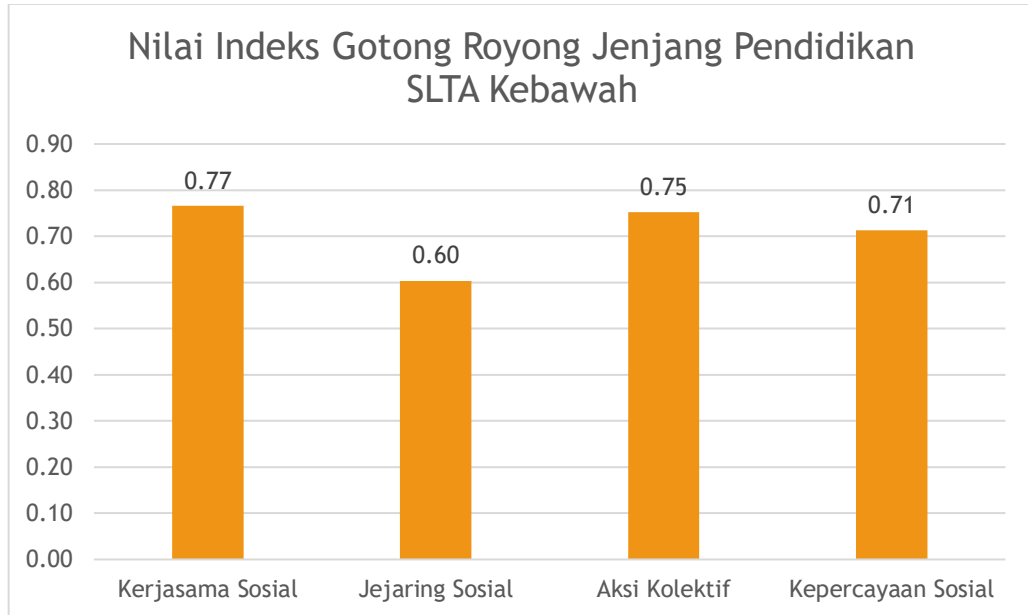


Gambar 4. 12 Nilai Indeks Gotong Royong Jenjang Pendidikan Pascasarjana (S2/S3)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks gotong royong yang paling tinggi diraih oleh jenjang pendidikan pascasarjana (S2/S3). Dari keempat indikator dari variabel gotong royong, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kerjasama sosial yaitu sebesar 0,81 yang kemudian diikuti oleh indikator kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,73 dan dilanjut oleh indikator jejaring sosial yaitu sebesar 0,68 serta yang terakhir yaitu indikator aksi kolektif dengan nilai indeks sebesar 0,67. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada jenjang pendidikan Pascasarjana (S2/S3) tersebut termasuk pada

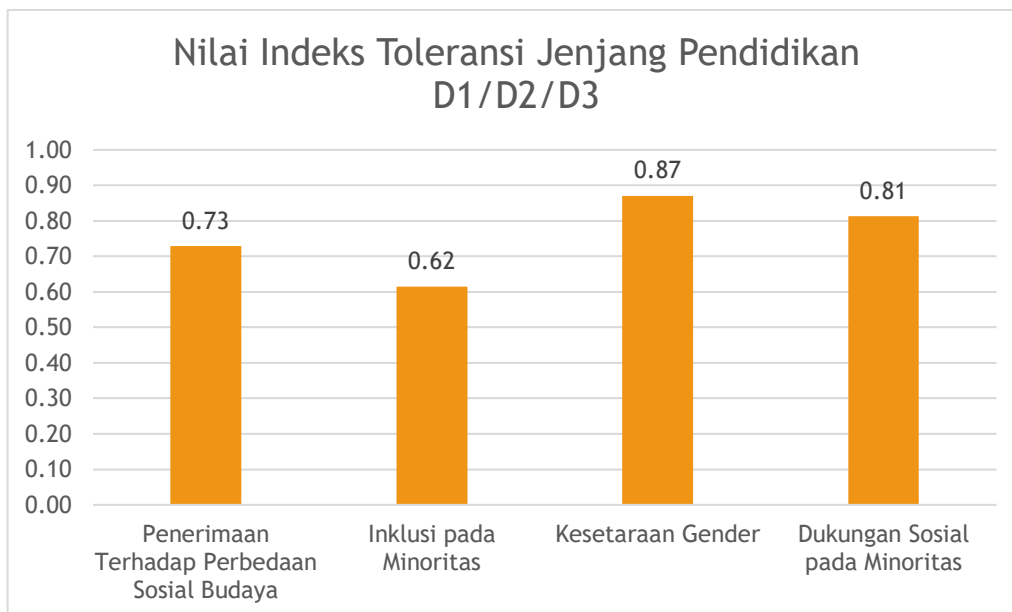
kategori Baik. Sementara itu, nilai indeks gotong royong berdasarkan jenjang pendidikan yang paling rendah diraih oleh tingkat pendidikan SLTA kebawah dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. 13 Nilai Indeks Gotong Royong Jenjang Pendidikan SLTA Kebawah

Sumber: Data primer diolah, 2019

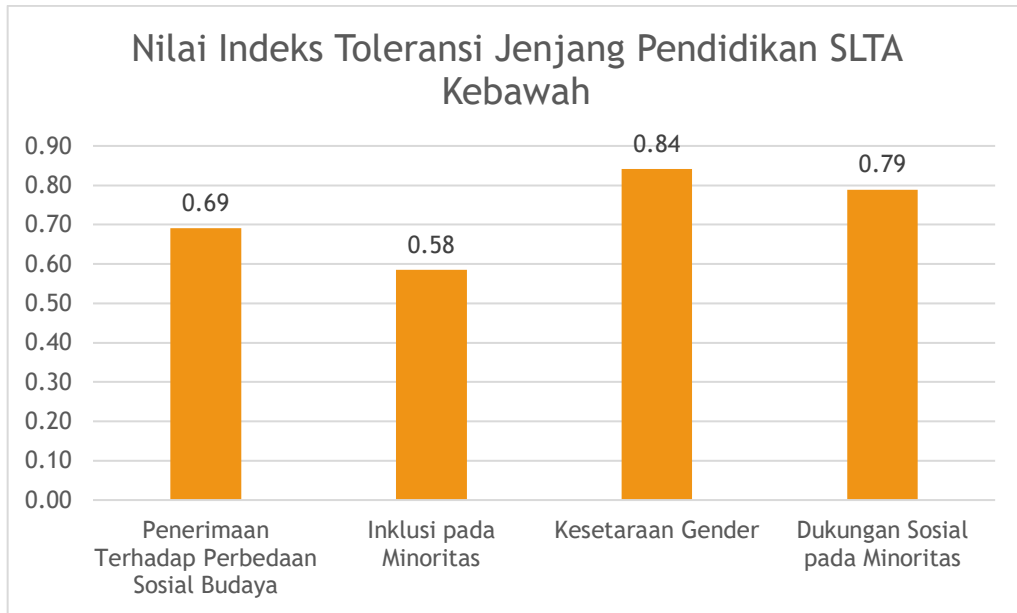
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa dari keempat indikator pada variabel gotong royong yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kerjasama sosial yaitu sebesar 0,77 kemudian diikuti oleh indikator aksi kolektif yaitu sebesar 0,75 dan dilanjut oleh indikator kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,71 dan yang terakhir indikator jejaring sosial yaitu sebesar 0,60. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada jenjang pendidikan SLTA kebawah termasuk pada kategori Baik kecuali 1 variabel yaitu Jejaring Sosial dengan nilai 0,60 yang masuk pada kategori Kurang Baik. Untuk nilai indeks toleransi pada jenjang pendidikan, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada jenjang pendidikan D1/D2/D3, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 14 Nilai Indeks Toleransi Jenjang Pendidikan D1/D2/D3

Sumber: Data primer diolah, 2019

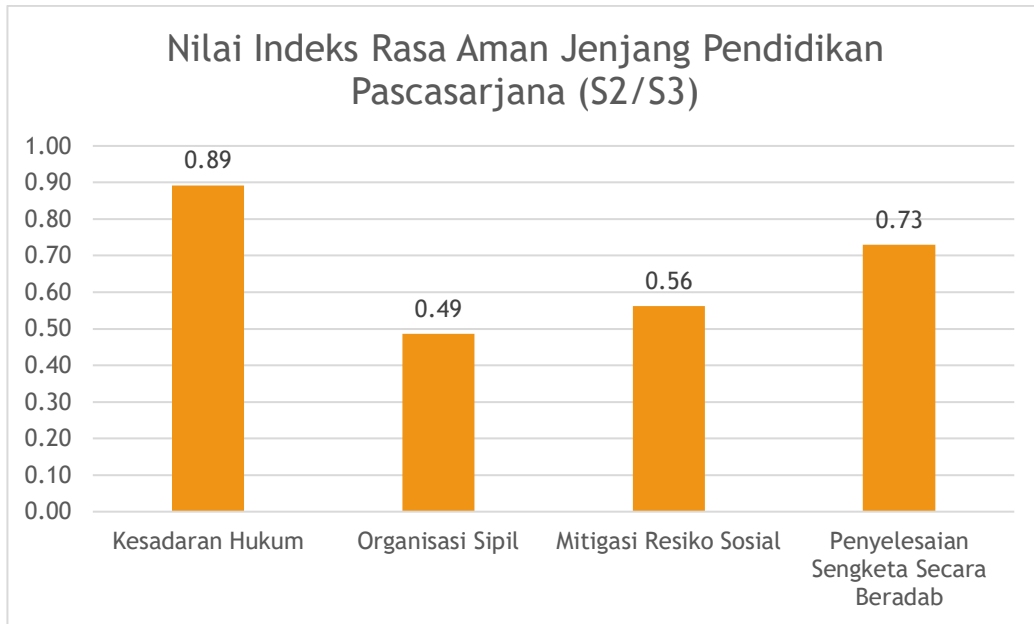
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator pada indeks toleransi di jenjang pendidikan D1/D2/D3 yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,87 kemudian diikuti oleh indikator dukungan sosial pada minoritas yaitu sebesar 0,81 dan dilanjut oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,73 serta terakhir yaitu indikator inklusi pada minoritas dengan nilai sebesar 0,62. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada jenjang pendidikan D1/D2/D3 termasuk pada kategori Baik kecuali 1 variabel yaitu Inklusi pada Minoritas dengan nilai 0,62 yang masuk pada kategori Kurang Baik. Sementara nilai terendah indeks toleransi pada jenjang pendidikan diraih oleh tingkat pendidikan SLTA kebawah yang secara rinci tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 15 Nilai Indeks Toleransi Jenjang Pendidikan SLTA Kebawah

Sumber: Data primer diolah, 2019

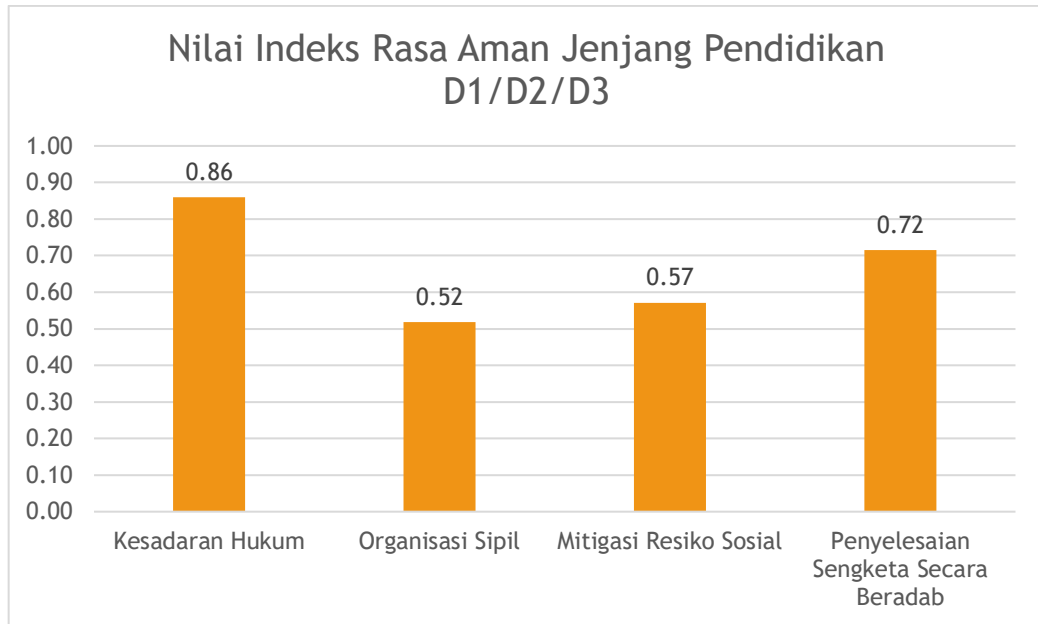
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator dari indeks toleransi pada jenjang pendidikan SLTA kebawah yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesetaraan gender sebesar 0,84 dan disusul oleh indikator dukungan sosial pada minoritas sebesar 0,79 kemudian dilanjut oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya sebesar 0,69 serta yang terakhir adalah indikator inklusi pada minoritas dengan nilai sebesar 0,58. Capaian nilai variabel dari indkes toleransi pada jenjang pendidikan SLTA kebawah termasuk pada kategori Baik kecuali 1 variabel yaitu Inklusi pada Minoritas dengan nilai 0,58 yang masuk pada kategori Kurang Baik. Untuk nilai indeks rasa aman pada jenjang pendidikan, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan pascasarjana (S2/S3), secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 16 Nilai Indeks Rasa Aman Jenjang Pendidikan Pascasarjana (S2/S3)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator dari indeks rasa aman pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2/S3) yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesadaran hukum sebesar 0,89 kemudian dilanjut oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab sebesar 0,73 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial sebesar 0,56 serta yang terakhir indikator organisasi sipil sebesar 0,49. Capaian nilai variabel dari indeks rasa aman pada jenjang pendidikan Pascasarjana (S2/S3) termasuk pada kategori Baik kecuali 2 variabel yaitu Organisasi Sipil dengan nilai 0,49 dan Mitigasi Resiko Sosial dengan nilai 0,56 yang termasuk pada kategori Kurang Baik. Sementara nilai terendah indeks rasa aman pada jenjang pendidikan diraih oleh tingkat D1/D2/D3 yang secara rinci datanya terlihat pada grafik berikut:



Gambar 4. 17 Nilai Indeks Rasa Aman Jenjang Pendidikan D1/D2/D3

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator dari indeks rasa aman pada jenjang pendidikan D1/D2/D3 yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesadaran hukum sebesar 0,86 kemudian dilanjut oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab sebesar 0,72 dan diikuti oleh indikator mitigasi resiko sosial sebesar 0,57 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil sebesar 0,52. Capaian nilai variabel dari indikator rasa aman pada jenjang pendidikan D1/D2/D3 termasuk pada kategori Baik kecuali 2 variabel yaitu Organisasi Sipil dengan nilai 0,52 dan Mitigasi Resiko Sosial dengan nilai 0,57 yang termasuk pada kategori Kurang Baik.

F. Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Tipologi Kecamatan

Berdasarkan hasil nilai Indeks Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya adalah melihat nilai IPMAS berdasarkan kecamatan. Adapun hasil nilai IPMAS perkecamatan adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	IPMas Kecamatan	Status
Bangorejo	0,73	Baik
Banyuwangi	0,71	Baik
Blimbingsari	0,73	Baik
Cluring	0,72	Baik
Gambiran	0,71	Baik
Genteng	0,71	Baik
Giri	0,72	Baik
Glagah	0,73	Baik
Glenmore	0,71	Baik
Kabat	0,72	Baik
Kalibaru	0,71	Baik
Kalipuro	0,74	Baik
Licin	0,69	Baik
Muncar	0,73	Baik
Pesanggaran	0,73	Baik
Purwoharjo	0,72	Baik
Rogojampi	0,73	Baik
Sempu	0,74	Baik
Siliragung	0,73	Baik
Singojuruh	0,73	Baik
Songgon	0,72	Baik
Srono	0,70	Baik
Tegaldlimo	0,72	Baik
Tegalsari	0,71	Baik
Wongsorejo	0,74	Baik

Dari nilai IPMas tersebut, selanjutnya adalah mengetahui nilai dari setiap variabel pembentuk IPMas sehingga diketahui variabel mana saja yang menyumbang nilai terbesar maupun nilai terendah. Adapun Variabel dari IPMas antara lain Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi, & Indeks Rasa Aman. Adapun nilai variabel pembentuk IPMas setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Indeks Gotong Royong Kecamatan		Indeks Toleransi kecamatan		Indeks Rasa Aman Kecamatan	
		Nilai	Status	Nilai	Status	Nilai	Status
1	Bangorejo	0,73	Baik	0,76	Baik	0,71	Baik
2	Banyuwangi	0,66	Baik	0,77	Baik	0,71	Baik
3	Blimbingsari	0,72	Baik	0,76	Baik	0,71	Baik
4	Cluring	0,68	Baik	0,79	Baik	0,68	Baik
5	Gambiran	0,63	Baik	0,74	Baik	0,76	Baik
6	Genteng	0,70	Baik	0,74	Baik	0,69	Baik
7	Giri	0,68	Baik	0,77	Baik	0,71	Baik
8	Glagah	0,73	Baik	0,77	Baik	0,69	Baik
9	Glenmore	0,68	Baik	0,76	Baik	0,70	Baik
10	Kabat	0,70	Baik	0,76	Baik	0,70	Baik
11	Kalibaru	0,68	Baik	0,76	Baik	0,70	Baik
12	Kalipuro	0,69	Baik	0,80	Baik	0,73	Baik
13	Licin	0,65	Baik	0,74	Baik	0,68	Baik
14	Muncar	0,69	Baik	0,78	Baik	0,71	Baik
15	Pesanggaran	0,71	Baik	0,80	Baik	0,69	Baik
16	Purwoharjo	0,71	Baik	0,76	Baik	0,68	Baik
17	Rogojampi	0,70	Baik	0,78	Baik	0,70	Baik
18	Sempu	0,71	Baik	0,78	Baik	0,73	Baik
19	Siliragung	0,68	Baik	0,81	Baik	0,71	Baik
20	Singojuruh	0,70	Baik	0,76	Baik	0,72	Baik
21	Songgon	0,73	Baik	0,73	Baik	0,69	Baik
22	Srono	0,64	Baik	0,75	Baik	0,71	Baik
23	Tegaldlimo	0,71	Baik	0,74	Baik	0,70	Baik
24	Tegalsari	0,70	Baik	0,75	Baik	0,69	Baik
25	Wongsorejo	0,71	Baik	0,77	Baik	0,73	Baik

DAFTAR PUSTAKA

- Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro University
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama). Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: SUN
- Abu Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Frank G. Goble. 1987. Mazhab ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow. Yogyakarta: Kanisius
- Johannes Muller. 2006. Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Achmad, Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence, Kencana, 2009, hal 510
- Casram. 2016. Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 2 (Juli 2016): 187-198.
- Sri Wahyuni. 2014. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pt. Perkebunan Nusantara V Di Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau. [Online] Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/4183/3/BAB%20II.pdf> pada [18 November 2018].
- Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi, dan *Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, Hasibuan. 2013. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013)